



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM MEMBANGUN BANGSA DAN WATAK BANGSA (NATION & CHARACTER BUILDING)

Oleh

Drs. Hambali, M.Si

*Dosen PPKn FKIP Universitas Budi Utomo Malang

ABSTRAK

Bertolak dari berbagai persoalan yang melanda bangsa dan negara, krisis multidimensional yang berimbas pada krisis sikap moral, perilaku, serta karakter dan kepribadian manusia Indonesia. Di samping berbagai persoalan bangsa dan negara, seperti konflik horizontal antar komunitas dalam masyarakat, konflik vertikal antar daerah dengan pusat (gerakan separatis daerah), bahkan sampai pada konflik/sentiment batas wilayah dengan negara tetangga, serta ancaman ideologi-isme dan intervensi negara lain terhadap kedaulatan NKRI. Semua persoalan di atas penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan warganegaranya. Dengan demikian Pembelajaran PKN menjadi semakin strategis dan penting untuk membentuk kepribadian yang berwawasan NKRI. Dalam upaya membangun bangsa dan negara yang berkepribadian, memiliki watak kebangsaan serta memiliki kecintaan terhadap tanah air, disinilah peran strategis pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang harus dilakukan secara tri-pusat (yakni; pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat) menjadi semakin penting dan mendesak.

Kata kunci: Pembelajaran PKn, strategi, membangun watak bangsa

A. PENDAHULUAN

Bergulirnya “era reformasi” pada 21 Mei 1998 sebagai satu gerakan moral dan motivasi yang bercita-cita menata kembali (me-reform) aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara totalitas. Semangat, slogan dan yel-yel reformasi selalu terdengar di mana-mana yang pada intinya menghendaki kondisi bangsa dan negara yang sekarang akan lebih baik dari pada kondisi sebelumnya, sebagai akibat dari berbagai krisis yang melanda bangsa.

Sebelum reformasi bergulir,

Koentjaraningrat (1994) menyatakan bahwa “... keberantakan ekonomi tersebut berjalan sejajar dengan kemunduran sektor-sektor kehidupan sosial-budaya seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi dan korupsi menyeluruh, sudah kita alami semuanya, dank arena itu tak perlu diperinci lebih lanjut”. Bersamaan dengan hal di atas pada delapan tahun silam, bangsa Indonesia telah “jatuh-terpuruk” lebih-lebih disebabkan berbagai krisis (*multidimensional crisis*) melanda bangsa Indonesia yang berawal dari krisis moneter, kemudian merambah ke krisis



moneter, kemudian merambah ke krisis ekonomi, politik, sosial, kepemimpinan nasional, dan moral bangsa. Krisis multi dimensional sebagai pokok masalah “benang merah” suatu istilah yang digunakan dalam berbagai issue dan wacana krisis yaitu “kondisi gawat – darurat, genting” yang melanda bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi nasib bangsa yang terpuruk itu, oleh sebagian kalangan menuding rezim Orde Baru (Orba) dan Presiden Soeharto sebagai penyebabnya. Selama lebih dari tiga dasawarsa Soeharto mengendalikan jalannya roda pemerintahan dianggap tidak demokratis. Meskipun demikian, bila mencermati dari obrolan dan “bisik-bisik” di kedai kopi di mana sebagai tempat masyarakat kelas menengah ke bawah bertemu dan bersosialisasi, sesekali terlontar ucapan dari mulut mereka dalam membanding era-reformasi dan zaman Pak Harto (Orba) bahwa”... *lebih enak zamannya Pak Harto dari pada kondisi bangsa sekarang*” dan mereka lagi-lagi merindukan iklim dan kondisi pada masa Orba.

Sebagian kalangan masyarakat memuji kondisi stabilitas keamanan, ketertiban, ketersediaan pangan dan papan pada zaman Orba. Sebagian kalangan juga ada yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat ini kaitannya dengan sikap, prilaku, dan watak atau temperamen sebagaian orang. Misalnya fenomena sikap, prilaku dan watak sebagian orang yang tidak sepatutnya (*seperti; orang mudah terpropokasi, bertindak destruktif, main hakim sendiri, demonstrasi sana-sini, ada*

beberapa aparat dan pejabat yang terindikasi krosupsi, para remaja terperangkap narkoba, menipisnya kesadaran akan hokum, dan bahkan sampai aksi adu jotos para wakil rakyat/ anggota DPR juga tidak terelakkan, dan lain-lain). Suatu fenomena, indikasi, dan realita mengenai sikap, prilaku, dan watak atau temperamen sebagian orang, mengindikasikan betapa rendahnya bangsa dan watak bangsa Indonesia dewasa ini.

Pada sisi lain, khususnya penghayatan, pengamalan ideologi dan faham pada indikasi umum, sebagian manusia Indonesia terjebak dan cenderung memuja faham *liberalistik, individualistik, dan kapitalistik*, oleh karenanya manusia terbuai dan berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan, sehingga kesadaran sosial tidak lagi dijadikan acuan dalam kehidupannya. Manusia Indonesia lupa dan kehilangan watak dan jatidirnya, makna Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara tidak lagi dijadikan acuan dan tidak dijunjung tinggi sebagai pedoman sikap dan prilaku bangsa Indonesia. Sehubungan dengan kenyataan di atas, bahwa implementasi dari sebuah gerakan dan semangat reformasi dapat dikatakan tidak banyak membawa kearah perubahan positif yang signifikan dari berbagai aspek, terutama aspek sikap, prilaku, watak dan atau temperamen masyarakat Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa PKn masih diperlukan sebagai pembelajaran yang strategi dalam membangun bangsa dan watak bangsa. Membangun bangsa dan watak bangsa dalam negara yang pluralistik adalah suatu keharusan dalam

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



memupuk nasionalisme (paham kebangsaan) guna melanggengkan integritas bangsa dan negara Indonesia dalam bingkai NKRI, serta menjadi hal yang prinsip sebagai kepribadian, watak dan jati diri bangsa-bangsa beradab.

Dalam rangka membangun manusia itu perlu pula dikembangkan sistem pendidikan nasional yaitu sebuah tatanan kelembagaan kependidikan yang mampu membina kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, disamping nilai-nilai Pancasila yang masih dipandangan sebagai “*cobesive force*” (daya pemersatu) sebagai landasan kokoh, sebagai pandangan hidup, dan kepribadian bangsa.

B. KONSEPSI/PENGERTIAN, OBYEK DAN TUJUAN PKN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah sebagai usaha pembelajaran warga negara (mahasiswa/siswi) yang diharapkan melalui pemberian serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, patriotisme dan demokratis kepribadian dan karakter warganegara.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 267/DIKTI/KEP/2000, bahwa pada jenjang Pendidikan Tinggi, materi dan obyek pembahasan PKN mencakup; (1) Pengantar PKN (mencakup hak dan kewajiban warga negara; pendidikan pendahuluan bela negara; Demokrasi Indonesia, dan (4) Politik dan Strategi nasional.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum memberikan pengetahuan tentang hubungan warga negara dan negara, serta membentuk kompetensi dasar kepribadian dan sosial bagi

warganegara. Secara lebih khusus tujuan pembelajaran PPKn terdapat perbedaan penekanan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

C. PKN DALAM TINJAUAN HISTORIS

Pendidikan Kewarganegaraan Pengetahuan sosial dan studi sosial adalah terjemahan dari *social studies*, merupakan suatu muatan program pembelajaran yang pada sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat sudah dijadikan materi pembelajaran bagi dunia pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Substansi obyek dan kajian pengetahuan sosial seperti sejarah, geografi, dan ekonomi lebih memberikan pengetahuan dan informasi tentang penelaahan masyarakat.

Tujuan, motivasi, dan tuntutan mendesak bergulirnya pengajaran sosial (*social studies*) pada siswa sekolah-sekolah di Amerika lebih dikarenakan pada orientasi masyarakat AS yang multi etnik dalam rangka mengakomodasikan perbedaan-perbedaan latar belakang sosial-kultural dan etnisitas di bawah satu kebangsaan (*united nations*) terutama pasca Perang Dunia pertama. Seperti dikatakan Daldjoeni (1992:6-7) bahwa: Di Amerika Serikat berkembangnya *social studies*, sesudah perang dunia pertama (1920), ketika diperlukan integrasi nasional yang mendesak. Negeri tersebut banjir imigran dari Eropa Timur dan Eropa Selatan yang dikhawatirkan akan dapat mengacaukan perkembangan peradaban Anglo-Saxon yang mencirikan kekhasan peradaban Amerika Serikat. Para ahli pendidikan di sana berkesimpulan bahwa dalam



menghadapi itu semua pengajaran sejarah kurang lagi mampu membekali para siswa untuk dapat mengerti masalah kontemporer. Dengan demikian pengintroduksian *social studies* dipandang sebagai obat yang diharapkan mujarab.

Pengajaran sosial yang inklud dengan pengajaran civics secara lebih terarah di Indonesia, semula berkembang pada tahun 1960-an, dimana terdapat lembaga pendidikan tinggi (pada saat itu FKIS IKIP Malang) telah memprogramkan bidang sub jurusan/studi Civic Hukum 1963. Tujuan dibentuknya sub jurusan itu adalah guna memenuhi ketersediaan guru/pengajar civics. Ide dan motivasi dibentuknya sub jurusan dimaksud terinspirasi bahwa setiap negara berusaha melakukan pembinaan terhadap warganegaraanya dengan menjadi warga negara yang baik melalui pendidikan formal. Setelah beberapa tahun kemudian lebel/nama jurusan juga selalu berganti-ganti dari Civic Hukum (1963), Sejarah Civic Hukum (1970), Sub Departemen Civis (1975), Departemen Civics Hukum (1980), PP dan KN (1982), tahun 1984 menjadi PMP dan KN, tahun 1995 sampai sekarang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Seiring dengan dinamika dan perkembangan pengajaran kewarganegaraan (civics, civics hukum, PMP) langkah-langkah dan metode yang di laksanakan di IKIP Malang pada saat itu menjadi model dan cenderung di ikuti oleh departemen/jurusan yang ada di lingkup IKIP/LPTK terutama di luar pulau Jawa.

Tujuan pengajaran sosial dalam kaitannya dengan pendidikan

kewarganegaraan di Indonesia lebih diarahkan kepada pendidikan dan atau pembelajaran siswa dalam rangka memahami realita-realita sosial masyarakat Indonesia dengan segala latar belakang sosial-kultural yang ada, yaitu fenomena sosial, dan masalah-masalah sosial serta solusinya, selain pembinaan siswa dalam aspek sikap dan prilaku (sebagai warga negara dalam memahami hak dan kewajibannya dalam arti yang luas). Materi pengajaran disajikan/diberikan berbeda pada tiap-tiap jenjang sekolah dengan pertimbangan daya pikir dan usia yang dikaitkan dengan tingkat kesukaran memahami materi pengajaran.

D. KURIKULUM DAN LANDASAN HUKUM PKn

Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 39 (2) mengamanatkan bahwa, di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan khusus di Perguruan Tinggi yang lebih dikenal dengan Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Termasuk dalam kelompok Matakuliah Dasar Umum (MKDU).

Implementasi dari ketentuan di atas bagi jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan digabung ke dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Sedangkan di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan digabung dengan Pendidikan Kewiraan. Pendidikan Kewarganegaraan (Perguruan Tinggi) melalui Surat Dirjen Dikti No.



267/DIKTI/2000 dikenal dengan nama Pendidikan Kewiraan. Materi pembelajaran Pendidikan Kewiraan lebih menekankan pada Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), dan pembahasan tentang hubungan antara warga negara dan negara.

Landasan hukum Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang GBHN, (3) UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, (4) UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan (5) Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian.

E. PARTISIPASI DAN USAHA MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA

Pasca pergantian pemerintahan (rezim penguasa) di Indonesia, sejak 21 Mei 1998 hingga sekarang khususnya dari Orla ke era reformasi, berimplikasi pada pengelolaan pemerintahan negara serta aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pemerintahan dan ketatanegaraan terus bergulir sampai pada issue suksesi kepemimpinan nasional sehingga terjawab dengan telah bergantinya empat Presiden RI yakni B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono. Dari masing-masing Presiden yang telah mengemban tugas pemerintahan negara itu diantara mereka lahir kebijakan-kebijakan strategis dan selalu mendapat tanggapan kontroversial dari berbagai kalangan

“*hight-tect*”; Gus Dur dengan kebijakan demokratisasi dan HAM; Megawati prioritas kebijakan yang dianggap tidak jelas; dan SBY dinilai pro-Barat dan AS serta tidak lebih tegas.

Dalam hitungan waktu 1998 s/d 2006 rata-rata periode setiap Presiden menjabat 2 (dua) tahun. Sebuah kebijakan strategis dari setiap pemerintahan untuk waktu yang relatif singkat kurang lebih dua tahun adalah tidak memadai guna menata bangsa dan negara. Terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah digulirkan itu dari keempat presiden, ternyata mendapat tanggapan dan penilaian pro-kontra dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menanggapi dan menilai kondisi dan iklim bangsa dan negara saat ini tidak lebih baik dari pada Orba, bahkan dianggap telah “terpuruk”, “carut-marut”, terjerumus dan tak sanggup bangkit, sehingga melahirkan keprihatinan mendalam. Namun tidak sedikit pula kalangan menanggapi dan menilai bahwa kondisi bangsa sekarang sudah lebih baik dari pada kondisi sebelumnya (Orba).

Seiring dengan kondisi dan perkembangan yang telah, sedang, dan akan dilalui dalam menata bangsa dan negara untuk melangkah, telah lahir gerakan, organisasi, dan lembaga yang prihatin dan peduli terhadap fenomena nasib dan kondisi bangsa dalam era reformasi. Gerakan, organisasi, dan lembaga dengan semangat memperjuangkan visi misi menyelamatkan bangsa dalam NKRI sebagai amanat Proklamasi Kemerdekaan RI dimaksud antara lain:

- 1) Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) yang dipelopori oleh cendekiawan muslim Prof. Dr.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Nurcholis Madjid (Alm) dkk.

- 2) Lembaga Kerjasama Penumbuhan Karakter Bangsa (LKPKB) yang didirikan 20 Mei 2000 sebagai gerakan dengan visi misi: “*nation and character building*”. LKPKB terbentuk sebagai kemitraan antar PTN-PTS (sampai sekarang berjumlah 18 PTN – PTS).
- 3) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) dengan visi misi perjuangan untuk meningkatkan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai amanat Proklamasi sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD Proklamasi (aktif memberi masukan dalam proses revisi atas amandemen UUD 1945 yang dianggap banyak memprihatinkan karna kontroversial sampai pasca uji sah April 2004 oleh Komisi Konstitusi bersama berbagai komponen bangsa.
- 4) Gerakan dengan visi misi untuk menegakkan (dan menyelamatkan) jati diri bangsa, ialah Yayasan Jatidiri Bangsa yang dipelopori oleh tokoh-tokoh senior di Lemhanas. Gerakan ini bersama komponen bangsa melaksanakan misi Membangun Kembali Karakter Bangsa melalui Penyemaian Jatidiri Bangsa melalui berbagai seminar lokakarya, maupun penulisan buku.

Partisipasi dan kontribusi dalam menata kehidupan negara, tidak saja dilakukan oleh organisasi dan lembaga di atas, selain itu sumbang, saran, dan pemikiran juga datang dari kalangan mahasiswa melalui badan/unit kemahasiswaan, mereka selalu perhatian

terhadap arah kebijakan pemerintah yang selalu dalam kontrol dan pantauan mereka, yang akhir-akhir ini ditunjukkan dalam gerakan moral/ demonstrasi, dan diskusi akademik. Perhatian serupa juga datang dari lembaga swadaya masyarakat /LSM, seperti ICW, KontraS, dan Gowa, *Indonesia Procurement Watch* (IPW), LSM, serta lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang ada. Peran serta komponen masyarakat menjadi penting dalam rangka mengawal proses membangun bangsa dan negara. Seperti dikatakan Kansil, C.S.T (2003: 92) bahwa; “Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad dan semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara”. Pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

F. KONSEP BANGSA DAN WATAK BANGSA

Sebagai negara berdaulat, Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Suku-suku bangsa yang ada itu mendiami bentangan daratan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dengan segala latar belakang adat-istiadat, budaya, dan sistem sosial yang beranekaragaman pula. Keanekaragaman suku bangsa itu pula oleh *furnifall* diistilahkan sebagai bangsa yang pluralistik atau majemuk. Kemajemukan suku bangsa itu tidak menjadikan bangsa Indonesia terkotak-kotak, melainkan terintegrasi ke dalam suatu bangsa (*nation*) yang mempunyai kemauan bersama serta diikat persamaan kepentingan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Makna “bangsa” (*nation*) adalah suatu nyawa, suatu azas akal, yang terjadi dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat, kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan ‘bangsa’ itu (Ernest Renan dalam Soekarno, 1964: 3). Sedangkan makna “nasionalisme” Sukarno mengatakan adalah suatu itikad; suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu “bangsa”.

Pengertian watak bangsa (*nation character*) meliputi: (1) kepribadian bangsa, (2) karakter bangsa, dan (3) jatidiri bangsa, secara umum ketiganya diartikan sebagai totalitas sikap dan prilaku. Namun dalam pembicaraan yang lebih terarah dapat dibedakan satu dengan lainnya. Pemaknaan kepribadian (*person*) seseorang selalu diidentikkan dengan ciri-ciri kerohanian yang melekat pada diri pribadi bersifat khas dan khusus yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain. Kepribadian atau *personality* adalah totalitas potensi yang melekat pada setiap orang sebagai faktor pengakuan (*pelebelan*) yang diberikan seseorang kepada orang lain.

Membangun bangsa bermartabat dibutuhkan sikap dan prilaku sebagai suatu sifat yang kuat dan sungguh-sungguh (komitmen) sebagai gejala jati diri bangsa. Guna membangkitkan karakter bangsa Koentjaraningrat (1994: 45) melihat kemunduran-kemunduran sikap dan prilaku sebagian besar orang Indonesia yang bersumber pada

kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas, yang harus disadarkan. Sikap dan prilaku diistilahkan sebagai “*mentalitas*” di antaranya; (1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu, (2) sifat mentalitas yang suka menerabas, (3) sifat tak percaya pada diri sendiri, (4) sifat tak berdisiplin murni, dan (5) sifat dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Dalam rangka memperkokoh kepribadian dan jatidiri bangsa, mencermati pidato Perdana Menteri Malaysia di hadapan parlemennya akhir Maret 2006, Abdullah Ahmad Badawi ketika memaparkan misi program 9th *Malaysia Plan* (9MP) menyatakan; bahwa salah satu faktor menjadi negara maju adalah kapabilitas dan karakter rakyatnya, dan Malaysia perlu mengadopsi pendekatan menyeluruh terhadap sumberdaya manusia, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga etika, cara berpikir, yang progresif dan kesadaran budaya (dalam Jawa Pos, 1 April 2006: 14).

G. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pembangunan sebuah negara tidak selalu berorientasi dan mengejar kemajuan pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) belaka, namun tak kalah pentingnya bahwa pembangunan dan pembinaan pada aspek sumber daya manusia (SDM). Dengan pembangunan SDM yang berkualitas, diharapkan mampu menciptakan dana mengelola kecanggihan Iptek. Dalam rangka membentuk kepribadian dan karakter manusia Indonesia (kualitas SDM) yang



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berlandaskan nilai-nilai luhur dan falsafah bangsa Pancasila, dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis. Terdapat dua metode/pendekatan pembelajaran PKn, (1) secara instruksional dilakukan dengan metode-metode yang lazim di lingkungan sekolah, (2) dan pembelajaran dan pendekatan khusus dalam PKn.

Mencermati obyek yang dibahas dalam Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa pada jenjang Pendidikan Tinggi, materi dan obyek pembahasan PKn mencakup; (1) Pengantar PKn (mencakup hak dan kewajiban warganegara; pendidikan pendahuluan bela negara; Demokrasi Indonesia; Hak Asasi Manusia); (2) Wawasan Nusantara; (3) Ketahanan Nasional, dan (4) Politik dan Strategi nasional. Pada jenjang sekolah dasar, obyek pembahasan PKn lebih menekankan pada aspek-aspek pembelajaran sosial. Memperhatikan obyek yang dibahas dalam PKn, strategi pembelajaran dan pengajaran PKn dapat dilaksanakan dengan berbagai metode dan pendekatan.

Metode pembelajaran merupakan beberapa cara dan atau pendekatan yang dilakukan oleh guru secara terpadu dan terorganisir dalam menyampaikan materi/bahasan yang diajarkan kepada subyek didik atau pembelajar. Metode pengajaran (pembelajaran) menurut Surachmad, Winarno (tanpa tahun) merupakan cara yang diberikan guru kepada siswa dengan efektif, efisien, dan mudah ditangkap, dimengerti oleh siswa untuk mencapai keberhasilan. Dalam pengajaran PPKn di sekolah terdapat beberapa metode yang digunakan, antara lain: (1) metode ceramah, (2) metode

tanya jawab, (3) metode diskusi, (4) metode bermain peran, (5) metode inquiri, (6) metode pemberian tugas, (7) metode sosiodrama, dan (8) metode simulasi. Tentang metode pengajaran nama yang lebih pas dan sesuai untuk diterapkan kepada subyek didik/siswa, sangat tergantung kepada: (1) tingkat jenjang sekolah, dan usia subyek didik, dan (2) obyek/topik materi yang akan dibahas, (3) menuntut keterampilan pengajar (guru) kompetensi profesionalitas yang dimilikinya.

Terdapat beberapa metode, model, dan pendekatan khusus yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PKn, di antaranya:

Skenario Proses dan Kapabilitas Guru

Secara administratif, Satpel/SAP/Program Pengajaran dianggap sebagai struktur dan runtut dari proses awal sampai akhir pengajaran. Dalam proses pembelajaran PKn akan lebih menarik dan menuntut peran pengajar sebagai “sutradara”, menyusun skenario, sekaligus sebagai aktor. Dengan kata lain menuntut integritas dan penghayatan bagi pengajarnya.

Sumber Belajar

Sumber belajar dalam PKn dewasa ini tidak mutlak dari guru tetapi subyek didik diarahkan kepada sumber belajar yang lain, terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pemberitaan seperti media cetak (jurnal, koran, dan majalah), bahkan penggunaan internet (misalnya berkaitan dengan materi/ topik HAM, terhadap informasi peristiwa aktual pelanggaran HAM, badan nasional/internasional yang mengurus tentang HAM), hal ini jelas membutuhkan anggaran dan biaya tinggi.



Proses Pengajaran dan Penyajian Materi/topik

Dalam pembelajaran PKn perlu dicermati materi/topik yang dikaitkan dengan aspek kekinian secara kontekstual dan aktual terhadap objek, terutama peristiwa, fenomena, dan kebijakan pemerintah yang sedang mencuat dalam pemberitaan yaitu relevansi pemberitaan “hangat” dengan materi/topik PKn (misalnya pada materi/topik Demokrasi Indonesia, ketika proses Pemilu berlangsung maka guru harus menjelaskan hal itu, meski materi/topik tersebut ada pada urutan terakhir dalam buku teks). Dengan demikian tidak berarti pengajar harus membahas urut bab demi bab secara runtut.

Kebakuan Materi

Suatu hal yang masih melekat pada sebagian kalangan, ada anggapan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di pandang identik dengan Bidang Studi sebagai perpanjangan-tangan-pemerintah/penguasa, seperti zaman Orba, lebih ekstrem disebut “indoktrinasi” yakni sebagai instruksi, ajaran, dan pembenaran sejarah yang kebenarannya masih meragukan. Anggapan seperti itu di era reformasi, menjadikan PKn tidak menarik dan tidak populer.

Dengan pandangan seperti di atas, oleh pemegang otoritas/ pemerintah perlu memikirkan pendekatan atau paradigma baru guna menggugah kembali esensi pembelajaran PKn. Sebagai solusi, salah satunya adalah meninjau kembali terhadap referensi dan buku ajar PKn yang di dalamnya memuat bahasan/ topik

sejarah ketatanegaraan, yakni perlu diadakan “pemutihan sejarah” ketatanganan RI.

H. PENDIDIKAN KEWARGA-NEGARAAN (PKN) SEBAGAI PEMBELAJARAN STRATEGIS DALAM MEMBANGUN BANGSA DAN WATAK BANGSA

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab bangsa dan negara. Dengan demikian sebagai implementasi dari pokok pikiran mendasar harus ditempuh melalui tri-pusat pendidikan yang melibatkan sekolah, orang-tua, dan masyarakat. Manusia Indonesia seutuhnya (MIS) menurut Noor Syam, M. (2000: 102-103) Bangsa dan negara RI berupaya dan mengakui bahwa pusat dan prioritas pembangunan nasional adalah membangun kepribadian manusia, jasmani rohani, akal dan budi nurani; mental dan moral dan demi kesehatan, kesejahteraan dunia dan akhirat, yakni sebagai MIS yang dicita-citakan.

Melalui sekolah peran PKn sebagai pembelajaran strategi dalam rangka pembinaan dan pembentuk karakter, jatidiri, dan kepribadian bangsa yang secara teoritis-yuridis adalah menjadi sangat penting. Program instruksional khususnya pembelajaran dan pendidikan kewarganegaraan (PKn), tidak saja berlaku di Indonesia, bahkan program serupa juga dilakukan di beberapa negara [seperti; (1) Amerika Serikat; *History, Humanity, dan Philosophy*, (2) Jepang: *Japanese History, Ethics, dan Philosophy*, (3) Filipina: *Philipino, Family Planning, Taxation, dan Study of Human Right*] dilaksanakan secara formal



dan melembaga.

Khususnya di jenjang pendidikan tinggi (Depdiknas, 2003: 179) dengan visi; Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Sebagai pendidikan pengembangan kepribadian, obyek/topik bahasan mengenai hubungan warga-negara (hak, kewajiban, dan tanggung jawab) dengan negara, dan nilai-nilai kemanusiaan/HAM yang terdapat dalam silabi PKn dipandang mendukung dan efektif untuk membina subyek didik yang memiliki kepribadian tangguh.

Seiring dengan perkembangan era global, yang disebabkan pembangunan dan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) khususnya kemajuan yang dicapai dalam teknologi komunikasi dan informasi, yang berdampak luas terhadap aspek-aspek kehidupan manusia itu sendiri. Melalui teknologi komunikasi dan informasi (melalui situs internet) memudahkan orang untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Bahayanya, bila mana penerima informasi tidak mampu memilah informasi yang berupa anasir-anasir (nilai sosial-budaya asing) dan nilai-nilai baik dan yang buruk, maka akan berpengaruh terhadap sikap-sikap dan prilaku manusia

pemakainya. Disinilah peran strategis PKn sebagai bagian dari bidang Pembelajaran Pengembangan Kepribadian.

I. PENUTUP

Salah satu obyek materi/topik dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Pembelajaran PPBN yang terdapat dalam PKn sebelumnya merupakan bagian dari Pendidikan Kewiraan (khususnya di Perguruan Tinggi). Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks di atas adalah sebagai penjabaran dari konsepsi Wawasan Nusantara.

Berbagai persoalan bangsa dan negara, seperti; konflik horizontal antar komunitas dalam masyarakat; konflik vertikal antar daerah dengan pusat (gerakan separatis daerah); bahkan sampai pada konflik/sentiment batas wilayah dengan negara tetangga; serta ancaman ideologi-isme dan intervensi negara lain terhadap kedaulatan NKRI. Semua persoalan di atas penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga-negaranya. Dengan demikian Pembelajaran PKn menjadi semakin strategis dan penting untuk membentuk kepribadian yang berwawasan NKRI.

Pembelajaran PKn di perguruan tinggi diharapkan para lulusan memiliki kompetensi dasar, yakni sebagai warganegara yang sadar dan berwawasan kebangsaan dan mengerti akan konsepsi sistem ketahanan nasional. Pada jenjang sekolah dasar, melalui bidang IPS (kelas I s/d III) dan PKn-S (kelas IV s/d VI). Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pendidikan kewarganegaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sudah berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2005. *Katalog dan Deskripsi Mata Kuliah Jurusan PPKn*

Daldjoeni. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (untuk Mahasiswa IKIP / FKIP dan Guru Sekolah Lanjutan).*, Alumni, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Modul Acuan Proses Pembelajaran Mahakuliah Pengembangan Kepribadian*. Dirjen Dikti, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Jakarta.

Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. (Ed) (2004). *Reformasi di Persimpangan, Refleksi dan Tantangan Bangsa dalam Era Globalisasi*. UM – Press, Malang.

Noor Syam, M. 2000. *Pancasila, Dasar Negara RI, Wawasan Sosio-Kultural, Wilosofis dan Konstitusional*. Edisi II. Malang, Laboratorium Pancasila UM

Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi.*, Cetakan ketiga. Panitia Penerbit: *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta

Surachmad, Winarno. (tanpa tahun). *Metode Pengajaran Nasional*. IKIP Bandung.

Soeprapto,. (2006). *Membangun Karakter Bangsa sebagai Upaya Memperkokoh Jatidiri Bangsa Menghadapi Peluang dan Tantangan Post Modernisme*. (Makalah, dalam Seminar Nasional” Jatidiri Bangsa Menghadapi Peluang dan Tantangan Post Modernisme”), LPPKB, Unibraw, Malang

Sukaya, Endang Zaelani, dkk., (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.*, Edisi Reformasi., Penerbit: Paradigma, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., dan Christine., (2003). *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan.*, edisi Pertama PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Kansil, C.S.T., (1996). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Jawa Pos, 21 Maret, 2006. *Membangkitkan Kembali Minar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa SMA, Pengajaran PKN Dikemas Menarik*, hlm. 10

Jawa Pos, 1 April, 2006. *Majukan Malaysia dengan 9 MP*, hlm. 14